ISSN 1979 - 7648

OTONOMI

JURNAL ILMU ADMINSTRASI

ISSN : 1979 - 7648

STIA TRINITAS -AMBON

OTONOMI Vol. 10. No. 20, Agustus 2017

ANALISA KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Oleh
Hilarius Wandan, S.Sos., M.Si.
(Dosen STIA Saumlaki)

Abstract

This study was conducted to see the benefits of Village Government Policy on improving the Quality of Human Resources in Ingei Village, Tanimbar Selatan Sub-district, Southeast Maluku Regency. This research is a qualitative research. Data collection by interview, observation and further documentation by using qualitative data analysis from Miles and Huberman.

The results showed that the Provision of Assistance from Ingei Village Government to the Village Community in the case of Human Resource improvement is still based on the existence of family relationship and the interest of Political Village Head. As long as the community involvement in the formulation of village government policy is not yet complete, the Village Government still plays a full role in formulating every policy in the village. This affects the negative public perception of the Village Government in providing services to the Community, especially in relation to the Village Government's policy on human resource development.

Keywords: Policy Formulation and Human Resource.

Abstak

Penelitian ini dilakukan guna melihat manfaat Kebijakan Pemerintah Desa terhadap peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Desa Ingei Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat". Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi selanjutnya dengan menggunakan analisa data kualitatif dari Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan Pemberian Bantuan dari Pemerintah Desa Ingei Kepada Masyarakat Desa dalam hal peningkatan Sumber Daya Manusia, masih didasarkan pada adanya hubungan keluarga dan kepentingan Politik Kepala Desa. Selanjutnya keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan Pemerintah Desa belum sepenuhnya, Pemerintah Desa masih memegang peran penuh dalam merumuskan setiap kebijakan di Desa. Hal ini mempengaruhi persepsi masyarakat yang negatif terhadap Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat, terutama berhubungan dengan kebijakan Pemerintah Desa terhadap pengembangan sumber daya manusia.

Kata Kunci : Perumusan Kebijakan dan Sumber Daya Manusia.

PENDAHULUAN

Perkembangan Kehidupan manusia pada era globalisasi dewasa ini tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia merupakan subyek pembangunan. Manusia adalah agen perubahan (*Agen Of Change*) yang memiliki peran penting terhadap pertumbuhan dan peningkatan pembangunan, baik dari segi fisik maupun nono-fisik. Oleh sebab itu, manusia mesti dibentuk terlebih dahulu atau diberdayakan agar mengacu pada pembangunan fisik, manusia dapat terlibat secara penuh dan aktif untuk menunjang, bahkan hadie sebagai pengendali pembangunan.

Kebijakan memuat tindakan-tindakan nyata dan pilihan yang rasional menjadi syarat mutlak dari kebijakan baik pusat maupun daerah yang dalam perumusannya perlu dipertimbangkan konsekwensi yang akan terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal tersebut tidak saja dibahas oleh kalangan teoritis dan pemerhati, tetapi juga oleh para praktisi, bahkan telah menjadi isu publik (*public issues*) sehingga setiap orang tergerak untuk memikirkan dan mencari solusi atas masalah yang dihadapinya (Alaslan, 2021: 81).

Sehubungan dengan peningkatan pembangunan, maka Pemerintah diharapkan dapat berupaya dengan

berbagai macam metode dan strategi untuk membentuk dan memberdayakan manusia. Hal ini selalu saja mendapat hambatan bahkan kegagalan yang membuat segala upaya Pemerintah selalu menjadi sia-sia. Tantangan ini semakin memberatkan Pemerintah dalam merancang berbagai strategi baru untuk digunakan sebagai senjata dalam upaya pembangunan manusia. Pembangunan manusia dalam hal ini identik dengan upaya Pemberdayaan Masyarakat yang bermuara pada pencapaian tujuan Negara yakni Kesejahteraan Sosial sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Mengacu pada hal tersebut, perlu dipahami pengertian tentang latar belakang Pemberdayaan Masyarakat, dimana pemberdayaan itu sendiri secara etimologis merupakan istilah yang berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan.

Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya (kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya. Sedangkan pemaknaan pemberdayaan masyarakat menurut Madekhan Ali (2007) yang mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut : “pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah bentuk

partisipasi untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik. Dari dua definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan agar setiap masyarakat menjadi mampu dan kreatif dalam kehidupan bernegara, baik pada lingkup birokrasi pemerintahan, maupun pada desa sekalipun.

Membahas tentang pemberdayaan masyarakat pada tingkat desa, maka desa dalam hal ini dipahami sebagai kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat-istiadat yang diakui dan dihormati Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa mempunyai peran untuk melindungi masyarakat, dan sekaligus meningkatkan dan melastarikan nilai adat-istiadat yang menjadi warisan leluhur.

Selanjutnya Desa yang adalah bagian terkecil dari Negara Indonesia, juga merupakan lingkup operasional program pemerintah yang secara sistem, program pemerintah itu dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat yang berada atau masyarakat yang hidup dan menetap di daerah tersebut.

Kenyataan dari program-program pemerintah yang diimplementasikan dalam lingkup desa adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Terkait dengan itu, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah Desa pada umumnya ditantang untuk melakukan dan menyelenggarakan segala urusan demi meningkatkan pembangunan yang berlandaskan pada kepentingan masyarakat Desa. Berkenaan dengan itu, segala urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat di klasifikasikan dalam berbagai sektor dengan maksud peningkatan pembangunan secara universal agar dapat merelevansikan kualitas serta kemampuan masyarakat Desa dalam menghadapi pesatnya perkembangan jaman (*Era Developing*).

Untuk itu sangat diperlukan kematangan aparatur dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan kemampuan intelektual (*intellectual ability*) yaitu kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas mental berfikir, menalar dan memecahkan masalah dan Kemampuan fisik (*physycal ability*) yaitu

kemampuan melakukan tugas-tugas yang menurut stamina, ketrampilan, kekuatan dan karakteristik serupa (Alaslan, 2021: 82)

Bertolak dari deskripsi di atas, maka salah satu upaya pemerintah Desa dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berada di Desa adalah dengan menetapkan aturan atau kebijakan-kebijakan yang bersifat yuridis untuk menyederhanakan program-program tersebut dalam beberapa tahap yakni suatu rancangan pelaksanaan program pemerintah Desa dalam hal ini RPJM-Des (Rancangan Program Jangka Menengah Desa). Setelah itu rancangan tersebut diinfentarisasikan kembali ke dalam suatu rencana kerja pemerintah yakni RKP-Des (Rencana Kerja Pemerintah Desa) untuk dilakukan evaluasi program, dan kemudian dilengkapi dengan tahap rencana anggaran setiap program yang realisasinya melalui APB-Des (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), dan bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) serta Dana Desa (DD). Beberapa tahap yang telah diuraikan tersebut, adalah merupakan wujud pemberdayaan pemerintah desa secara khusus kepada totalitas masyarakat Desa Ilngai Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Desa Ilngai sebagai desa yang otonom pada tahun anggaran 2016,

menetapkan beberapa kegiatan yang bermuara pada program pemberdayaan masyarakat Desa yang meliputi :

1. Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda (Pelatihan Komputer)
2. Fasilitasi Kelompok Tani (Operasional Kelompok Tani)
3. Fasilitasi Terhadap Kelompok-Kelompok Rentan, Kelompok Masyarakat Miskin-Perempuan- Masyarakat Adat Dan Difabel (Tunjangan Mahasiswa)

Berbagai program pemberdayaan masyarakat sebagaimana diuraikan di atas belum menunjukkan keberhasilan dalam pengimplementasiannya, karena prosesnya tidak secara transparan dilakukan, dan pembuktiannya justru belum jelas dan mengarah pada kepentingan masyarakat. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas masyarakat justru dinilai tidak efektif pengaplikasiannya. Hal ini disebabkan oleh kegagalan program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga tujuan desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa sangat tidak bermanfaat bahkan tidak berdampak positif bagi pengembangan masyarakat desa itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan guna melihat pentingnya “Analisa Kebijakan Pemerintah Desa terhadap peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Desa

Ilngai Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat”, sehingga melalui berbagai kebijakan Pemerintah Desa yang dibuat, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan dan pertumbuhan masyarakat sebagai agen pembangunan bangsa.

KAJIAN TEORI

Kebijakan Publik

Kebijakan berasal dari bahasa Yunani yang secara etimologis dipahami dari kata “Polis” (negara kota) dan Pur (kota), yang dalam bahasa Latin dipahami sebagai *Politeia* (negara) dan dalam bahasa Inggris pertengahan dikenal sebagai *Policie*, yang mengandung arti mengendalikan berbagai masalah politik atau administrasi pemerintahan.

Bertolak dari makna etimologisnya, maka Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008) mendefinisikan kebijakan sebagai

serangkaian

tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Makna Kebijakan sebagaimana di

atas kemudian dirumuskan lebih spesifik dalam kerangka Kebijakan Publik oleh Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (2008) sebagai “Suatu tindakan pemerintah yang berupa program program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan”. Maksudnya bahwa berbagai agenda kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan hendaknya dapat mengarah pada tujuan hidup bermasyarakat di dalam lingkungan Pemerintahan itu sendiri.

Sementara itu Alaslan (2021) mengatakan bahwa Kebijakan itu tidak hanya dipahami sebagai sebuah konsep intervensi pemerintah terhadap persoalan publik, tetapi dipahami sebagai proses interaksi. Dalam proses ini, terdapat mekanisme pembangunan konsensus antara kepentingan pemerintah dan masyarakat. Suatu interaksi yang ideal pasti melibatkan proses partisipasi dari masyarakat, akuntabilitas dari pemerintah dan proses aktualisasi kebijakan (Alaslan, 2021: 17)

Lebih lanjut mengenai hal ini, James A. Anderson dalam Subarsono (2005), menjelaskan bahwa perumusan suatu kebijakan publik dilakukan oleh badan-badan dan aparat pemerintah, yang secara logal formal ditetapkan dalam suatu keputusan yang mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya aparat pemerintah Desa dalam hal ini tidak saja mencakup Kepala Desa

semata, melainkan melibatkan keseluruhan aparat pemerintah desa yang ditetapkan sesuai surat keputusan.

Sehubungan dengan pengertian kebijakan publik sebagaimana di atas, maka William Dunn (2007) menguraikan beberapa tahap pengambilan kebijakan yang penting dipahami, yakni ;

1. Tahap penyusunan agenda

Pada tahap ini setiap permasalahan yang dihadapi penting diuraikan agar akar permasalahan dimaksud dapat diketahui sehingga mudah untuk ditemukan penyelesaiannya. Melalui penetapan agenda yang konkrit dan relevan sesuai dengan realitas hidup masyarakat, maka setiap kebijakan yang akan ditetapkan diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas dan didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada.

3. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus

kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan penting ditetapkan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Hal ini tentunya harus didasarkan pada kebutuhan permasalahan yang pemecahannya perlu dilakukan guna mengatasi masalah yang dihadapi.

4. Tahap implementasi kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak

atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Diharapkan agar melalui ke-5 (lima) tahapan perumusan kebijakan ini dapat melahirkan sebuah kebijakan yang tepat dalam dan relevan sesuai dengan kebutuhan real masyarakat yang dihadapi

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dapat dipahami dari daya pikir dan daya fisik manusia. Hal ini menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Peralatan yang handal atau canggih tanpa peran aktif sumber daya manusia, yang tersedia tentunya tidak akan berarti apa-apa. Daya pikir adalah kecerdasan yang dibawa sejak lahir (modal dasar) sedangkan kecakapan diperoleh dari usaha (belajar dan pelatihan). Kecerdasan tolok ukurnya *Intelligence Quotient* (IQ) dan *Emotion Quality* (EQ).

Menurut Barthos (2009), sumber daya manusia merupakan tujuan pembangunan yaitu dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya. Dengan demikian sumber daya manusia mempunyai fungsi ganda ialah disamping sebagai faktor pembangunan juga sebagai tujuan dari pembangunan itu sendiri. Artinya, bahwa selain sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri, maka dalam hal ini sumber daya manusia juga merupakan objek pembangunan yang penting untuk

diperhatikan pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu (Hasibuan ; 2009). Dengan kata lain Hasibuan berpendapat bahwa sumber daya manusia menjadi unsur pertama dan utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Dengan demikian, maka Sonny Sumarsono (2003), menegaskan bahwa Sumber Daya Manusia atau human resources pada hakekatnya mengandung pengertian sebagai usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Sumber daya manusia dalam hal ini juga berhubungan dengan manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat.

Sehubungan dengan itu, maka Nawawi dalam Sedarmayanti (2007) mengatakan bahwa terdapat 3 (tiga) pengertian sumber daya manusia yang perlu dipahami, yakni :

1. Sumber daya manusia adalah manusia

yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan).

2. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
3. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (*non material/non financial*) di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (*riel*) secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Dengan demikian maka dapat dirumuskan bahwa sumber daya manusia dalam hal ini berhubungan dengan kemampuan yang dimiliki manusia, baik yang bersifat ilmu pengetahuan maupun pengalaman yang dimiliki dalam bidang keahlian tertentu, sehingga dapat membantu manusia dalam melaksanakan berbagai hal yang dipercayakan untuk dilaksanakan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan dengan pendekatan fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Penelitian

bertempat di desa Ilngi Kecamatan Tanimbar Selatan kabupaten Maluku Tenggara Barat. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara terarah dan dokumentasi

Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan langkah analisis dari Miles dan Huberman (Emzir, 2010) terdapat 3 (Tiga) bentuk kegiatan dalam tahapan analisis data kualitatif. meliputi;

1. Reduksi Data (*Data Reduction*), tahap ini bermaksud untuk melakukan perangkuman atau pemilahan terhadap data yang dianggap bermanfaat, sehingga data yang dianggap tidak bermanfaat adalah data yang tidak digunakan dalam proses paparan data.
2. Paparan Data (*Data Display*), tahap ini bermaksud untuk melakukan pemaparan atau penyajian data dalam bentuk deskriptif pada objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks, network (jejaring kerja).
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verifying*), tahap ini bermaksud untuk melakukan penyimpulan terhadap pemaparan atau penyajian data yang telah ada, dengan tujuan menjawab fokus penelitian ini.

Diharapkan agar melalui ke 3 (tiga) pendekatan analisa data penelitian ini,

dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh dari para informan pada lokasi penelitian.

PEMBAHASAN

Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pendidikan

Dunn (2002) berpendapat bahwa proses penentuan kebijakan dilakukan berdasarkan rangkaian proses yang panjang dan tidak mudah. Proses ini dimulai dari perumusan masalah yang di dalamnya membahas masalah-masalah masyarakat yang kemudian dianalisis kembali masalah yang bersifat mendesak dan dibutuhkan penanganan yang cepat. Selanjutnya penetapan agenda kebijakan dibahas secara menyeluruh untuk membuktikan kelayakan sebuah masalah untuk ditanggulangi, pembahasan permasalahan masalah yang diajukan dibahas dan dianalisis. Selanjutnya ditetapkan dalam agenda kebijakan masalah yang akan segera ditanggulangi, kemudian penentuan alternatif kebijakan yang di dalamnya memuat alternatif yang dipilih untuk menanggulangi masalah yang dihadapi masyarakat dengan mempertimbangkan kelemahan dan kelebihan, setelah melewati pertimbangan kelemahan dan kelebihan maka akan ada penyetujuan alternatif kebijakan untuk diangkat berdasarkan

pertimbangan kelemahan dan kelebihan.

Setelah itu alternatif yang telah disepakati akan diangkat dalam kebijakan, yang kemudian akan dilaksanakan dalam tahapan pelaksanaan kebijakan, setelah kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan dilaksanakan, maka perlu dilakukan monitoring dengan tujuan agar dapat mengetahui hambatan dan atau kelebihan sehingga jika terjadi perubahan maka dilakukan upaya penanggulangan yang tidak menimbulkan kerugian. Setelah monitoring dilakukan maka evaluasi kebijakan yang secara konseptual tidak hanya berada di akhir pelaksanaan kebijakan akan tetapi dari setiap tahapan kebijakan mulai dari perumusan masalah sampai dengan tahapan evaluasi itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian yang diharapkan dalam setiap tahapan kebijakan, serta mengantisipasi masalah yang dapat timbul tanpa terduga sebelumnya.

Terkait uraian di atas, mekanisme perumusan sebuah kebijakan terdiri dari rangkaian proses yang panjang, rumit, serta berkesinambungan namun konsep ini sangat bertolak belakang dengan kondisi riil yang penulis temukan di lapangan penelitian. Dikatakan demikian karena dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam perumusan kebijakan pemberdayaan

masyarakat di desa Ingei tidak dilaksanakan berdasarkan mekanisme perumusan kebijakan yang seharusnya. Sehubungan dengan ini, data yang diperoleh dari informan menunjukkan bahwa mekanisme perumusan kebijakan desa hanya dilakukan oleh kepala Desa sebagai pemimpin desa tanpa melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Dikatakan bahwa;

“Kebijakan antua (kepala desa) tentukan saja mo, dan kalo antua su tentukan berarti seng bisa rubah akang (*terjemahan; Kepala Desa mengambil Kebijakan Sendiri dan kalau sudah ditetapkan maka tidak dapat dirubah*)” (hasil wawancara; 2016)

Pendapat ini diperkuat dengan pengakuan dari Wakil ketua dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjelaskan bahwa kebijakan yang diambil selalu tertutup dan bersifat aklamatif, setiap kebijakan ditentukan langsung oleh pemerintah desa Ingei. Kenyataan ini membuktikan bahwa pemerintah Desa Ingei memegang kendali pemerintahan tanpa didasarkan pada kebutuhan melainkan kehendak pemerintah desa atau dengan kata lain kebijakan yang dilakukan bersifat *top down* sehingga tidak melalui mekanisme peramalan yang semestinya. Kemungkinan tentang kelemahan dan kelebihan terhadap Kebijakan yang diambil dapat terjadi karena tidak diprediksi sebelum

perumusanya dilakukan.

Selain itu ada harapan-harapan lain yang terselimum dalam kebijakan pemberian bantuan belajar kepada masyarakat yang tidak lain ialah saham politik dimana bantuan belajar diberikan kepada masyarakat dengan harapan masyarakat akan memberi dukungan kepada pemerintah dalam pesta demokrasi desa di masa mendatang. Hal ini secara jelas diutarakan oleh masyarakat terkait berbagai bantuan yang diberikan bahwa:

“bantuan itu diberikan agar masyarakat nanti pilih antua (Kepala Desa) lai par jadi kepala desa tahun depan” (hasil wawancara; 2016)

Segala bantuan diberikan dengan tujuan politik dan tanpa disadari tujuan-tujuan ini menyimpang dari tujuan yang sebenarnya. Dalam hal ini, pemerintah desa sebagai perpanjangan tangan negara diwajibkan untuk menjamin kesejahteraan hidup masyarakat secara keseluruhan tanpa harus membuat pemisahan antara masyarakat yang satu dengan lainnya dalam proses pemberian pelayanan. Atau dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian pelayanan kepada masyarakat hanya didasarkan pada kepentingan politik desa semata.

Sementara itu, pendapat lain dari masyarakat terkait dengan pemberian bantuan kepada masyarakat didasarkan pada adanya hubungan keluarga

masyarakat dengan Kepala Desa. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat lain menjelaskan bahwa pemerintah Desa dalam penyaluran Bantuan Pendidikan lebih diprioritaskan kepada masyarakat yang secara emosional memiliki hubungan kekeluargaan dengan Kepala Desa.

Lebih jelas mengenai hal ini disampaikan oleh masyarakat bahwa pemerintah Desa dalam lingkup Informasi penyaluran bantuan berdasarkan data yang diperoleh dari para informan menunjukkan bahwa pemerintah Desa dalam hal ini belum menjalankan tugas pelayanannya secara maksimal kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa dominasi kepentingan individu (Kepala Desa) masih sangat mempengaruhi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan dasar itulah, maka berbagai kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam hal pemberian bantuan Pendidikan masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Kepala Desa sebagai Pribadi, dan bukan sebagai pemimpin yang mengepalai wilayah Pemerintahan Desa.

Keterlibatan Masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Formulasi Kebijakan Desa

Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa badan

permusyawaratan desa yang selanjutnya disingkat BPD merupakan lembaga yang bertugas melakukan fungsi kontrol pemerintahan, untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan yang tidak diinginkan. Kontrol dalam kebijakan mempermudah masyarakat mengetahui dan memahami bentuk kebijakan yang sesuai dan benar-benar dibutuhkan. Kenyataan ini jauh berbeda dengan kondisi di Desa Ingei Kecamatan Tanimbar Selatan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dapat melaksanakan fungsi kontrolnya dengan baik, dan hal ini diakui oleh Ketua dan Wakil Ketua BPD yang menjelaskan bahwa;

“percuma katong kasih saran atau pertimbangan tetap saja seng pake, antua tentukan semua dengan seng ada yang boleh melawan, termasuk semua kegiatan yang akan dibuat, sampai pada orang yang akan ikut kegiatan juga ditentukan dan pasti antua pung orang-orang saja”. (hasil wawancara; 2016)

Nampak jelas bahwa kebijakan dibuat tanpa melalui mekanisme perumusan kebijakan yang benar, serta pembuat kebijakan menentukan kebijakan secara sepihak (ditentukan langsung), membuktikan bahwa pemerintah selaku pemegang kekuasaan tertinggi di desa menggunakan *Patronage System*, yaitu dalam menentukan program atau kegiatan secara khusus penerima bantuan belajar didasarkan pada keinginan untuk

membantu orang atau masyarakat tertentu, berdasarkan pada hubungan politik maupun hubungan keluarga. Selain itu, Kepala Desa memiliki Hak *prerogative* yaitu hak istimewa, dimana hak tersebut bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat digugat, sehingga apa yang telah diputuskan tidak dapat dilanggar atau dibantah sehingga membentuk ketidakberdayaan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat melalui fungsi kontrol yang dipererercayakan.

Pendekatan konseptual sangat bertolak belakang dengan realitas dalam masyarakat desa Ingei Kecamatan Tanimbar Selatan, yang dalam kenyataannya *Patronage system* dan *prerogative* menjadi dominan yang sehingga dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan tidak lagi didasarkan pada kebutuhan masyarakat melainkan keinginan atau kehendak pemerintah desa, atau dengan kata lain kebijakan asal bapa senang, masyarakat hanya menerima, dan badan permusyawaratan desa (BPD) tidak dapat berbuat apa-apa, “katong mau kontrol tetapi bale malu hati lai” (hasil wawancara; 2016)

Ketidakberdayaan ini memberikan ruang terjadinya penyimpangan pelaksanaan kebijakan. Situasi sebagaimana digambarkan di atas

menunjukkan bahwa BPD tidak efektif dalam menjalankan tugas pengawasannya.

Permasalahan Yang Terjadi Sebagai Akibat Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Pendidikan Pada Desa Ingei

Setiap kebijakan pastinya ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, yang dibahas dalam mekanisme perumusan sebuah kebijakan dengan melewati proses pembahasan sampai pada kelayakan sebuah kebijakan untuk diimplementasikan dan dalam proses tersebut akan tampak berbagai analisis yang dilakukan untuk meramalkan konsekwensi atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dengantujuan untuk dapat mengantisipasi perubahan dan meminimalisir terjadinya kegagalan pengimplementasian kebijakan.

Konsep diatas bertolak belakan dengan kenyataan yang dihadapi olem masyarakat di desa Ingei, hal ini nampak jelas bahwa kebijakan pemberdayaan masyarakat dibidang pendidikan dalam bentuk pemberian bantuan belajar tidak dilakukan dengan melewati sebuah mekanisme perumusan kebijakan, melaikan kebijakan ini ditentukan langsung oleh pemerintah desa dengan alasan sebagai berikut:

1. Ditemukan bahwa terdapat banyak masyarakat yang kurang mampu dalam hal finansial untuk melanjutkan

- studinya ke jenjang pendidikan tinggi,
2. Bantuan diberikan untuk menciptakan masyarakat yang berpendidikan,
 3. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi.

Ketiga alasan diatas menjadi barometer penentuan kebijakan pemberdayaan masyarakat dibidang pendidikan. Oleh karena kebijakan tidak dilakukan melalui mekanisme perumusan kebijakan yang benar maka tidak ada upaya antisipasi terhadap kemungkinan ketidakberhasilan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dibidang pendidikan tersebut.

Dengan demikian dalam proses implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dibidang pendidikan dalam bentuk pemberian bantuan belajar tidak berjalan maksimal karena :

1. Kebijakan pemberdayaan masyarakat dibidang pendidikan dinilai belum terlalu urgen untuk ditindaklanjuti,
2. Kebijakan pemberdayaan masyarakat dibidang pendidikan bukan merupakan kebutuhan keseluruhan masyarakat melainkan sebagian kecil masyarakat,
3. Terdapat nilai ketidakadilan, dimana pemberian bantuan belajar tersebut dikhususkan kepada pihak tertentu saja berdasarkan unsur kedekatan emosional dan unsur kedekatan politik dan unsur- unsur inilah yang menjadi

- pemici sifat antipati, acuh, tidak peduli dengan pemerintahan di desa ,
4. Tidak adanya kesepakatan yang bersifat mengikat antara penerima bantuan dengan pemerintah sehingga memberikan ruang bagi masyarakat tidak menggunakan bantuan yang diberikan dengan baik.
 5. Ditemukan adanya masyarakat (penerima bantuan) yang memutuskan putus kuliah dengan alasan yang tidak jelas.
 6. Tidak ada sanksi yang memberatkan masyarakat (penerima bantuan) sehingga masyarakat bersifat konsumtif atau bergantung.
 7. Masyarakat (penerima bantuan) tidak memiliki rasa bertanggung jawab terhadap bantuan yang diberikan.

Permasalahan-permasalahan di atas terjadi sebagai akibat yang sangat jelas dan nampak terlihat, karena berdasarkan pernyataan masyarakat dalam wawancara yang dilakukan ditemukan berbagai pernyataan yang mendukung.

Solusi Penyelesaian Masalah

1. Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perencanaan merupakan inti manajemen karena semua kegiatan harus didasarkan atas sebuah rencana. Dengan perencanaan akan memungkinkan para

pengambil keputusan atau dengan kata lain pemerintah untuk dapat menentukan langkah yang tepat dalam mengembangkan sumber daya manusia secara efektif dan efisien demi peningkatan kehidupan masyarakat yang lebih berdaya.

Untuk meningkatkan sumber daya manusia maka dibutuhkan perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang matang karena dengan demikian maka kegiatan atau program yang diputuskan sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang dapat terjadi sehingga akan mudah menentukan bentuk pengembang sumber daya manusia yang tepat selain itu kegiatan atau program akan lebih terarah serta mudah untuk mengontrol tujuan yang diharapkan dengan capaian.

Pemerintah desa Ilngai mengharapkan masyarakat yang memiliki kemampuan sumber daya manusia yang profesional sebagai bekal dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, harapan ini menjadi alasan pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan memberikannya dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat yang berkonsentrasi penuh dibidang pendidikan berupa

bantuan belajar.

Bantuan ini diberikan dengan tujuan untuk memberikan masyarakat (pelajar) kesempatan menikmati pendidikan yang layak, karena dengan demikian akan menciptakan masa depan yang lebih baik dengan modal pendidikan yang ditekuninya.

Dalam hal pengimplementasian keinginan masyarakat sebagaimana diharapkan, pemerintah Desa belum dapat melahirkan sebuah kebijakan yang relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Ilngai. Hal ini dibuktikan melalui data yang diperoleh bahwa kecenderungan pemerintah dalam menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat masih bersifat subyektif. Artinya, masyarakat yang diberikan kemudahan untuk menikmati pelayanan pemerintah Desa tersebut hanyalah pihak tertentu saja. Dikatakan bahwa pemerintah Desa Ilngai hanya punya masyarakat tertentu saja karena masyarakat itu saja yang dapat perhatian dari pemerintah desa (*terjemahan; Pemerintah Desa hanya memiliki masyarakat tertentu saja karena selalu diperhatikan oleh pemerintah*).

Data sebagaimana di atas memperkuat dugaan bahwa Pemerintah Desa Ilngai dalam hal penentuan kebijakan, tidak didasarkan pada perencanaan kebijakan yang ideal. Dengan demikian dalam proses

pengimplementasian kebijakan tersebut hanya mengakomodir kepentingan dari segelintir masyarakat Desa semata.

2. Perbaikan Mekanisme Perumusan Kebijakan

Menurut Ripley yang dikutip dalam Subarsono (2005) mengatakan perumusan kebijakan tidak serta merta dapat dilakukan, karena terdiri dari rangkaian perumusan yang panjang, rumit, dan kompleks, yang didalamnya memuat pertimbangan dan analisis kelayakan sebuah masalah untuk diangkat, terdapat alternatif pilihan kebijakan dan lain sebagainya, namun yang terjadi ialah pemerintah mengabaikan proses tersebut, dengan menentukan langsung kebijakan. Dengan demikian pemerintah desa Ilngai harus mengikuti mekanisme perumusan kebijakan. Hal ini penting sehingga dalam merumuskan kebijakan pemerintah desa Ilngai, telah dipertimbangkan berbagai konsekuensi yang akan terjadi dan kemungkinan untuk dapat meminimalisir konsekuensi tersebut diperoleh.

3. Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa Ilngai

Good governance (Pemerintahan yang baik) menjadi idaman setiap pemerintahan yang ada, hal ini akan baik apabila ditunjang oleh sumber daya aparatur pemerintahan yang baik pula maka, sangat dibutuhkan aparatur pemerintahan yang memiliki kemampuan

dan kompetensi untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan, demi pencapaian tujuan pemerintahan. Aparatur pemerintahan merupakan pelaku utama sekaligus penentu berhasil tidaknya sebuah kebijakan, oleh karena itu aparatur pemerintahan desa perlu diberdayakan sehingga dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab baik sebagai kepala desa sampai kepada kepala-kepala urusan tidak mengalami kesulitan.

Upaya pemberdayaan aparatur pemerintah desa harus dilakukan di desa Ilngai karena dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pemerintahan desa, aparatur pemerintah desa membutuhkan kecakapan intelektual, kepribadian dan moral yang dapat digunakan sebagai bekal untuk diimplementasikan dalam tindakan nyata untuk mengembangkan dan pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Pemberdayaan aparatur sangat perlu dilakukan karena memiliki manfaat yakni sebagai aspek pelengkap dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di desa Ilngai, Kecamatan Tanimbar Selatan. Manfaat tersebut ialah : Meningkatkan kualitas, inovasi, loyalitas, prestasi dan produktivitas pegawai,

1. Meningkatkan kreativitas dan komitmen para pegawai,
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sesuai tujuan

- organisasi,
3. Sebagai alat penting untuk memperbaiki kinerja,
 4. Dapat menyadarkan, mendukung, mendorong, dan membantu mengembangkan potensi yang terdapat pada diri individu.

Dari pendapat diatas dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa lemahnya kinerja aparatur pemerintah desa Ilngai teristimewah badan permusyawaratan desa (BPD) menyebabkan ketidakmampuan dalam melaksanakan fungsi kontrol baik dalam proses mengawal atau kontroling serta keterlibatan dalam mengimplementasikan kebijakan. Dengan kenyataan ini maka aparatur pemerinta desa haruh diberdayakan, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diemban dapat mampu, tanggap dan berkompetensi serta dapat mendorong kreatifitas aparatur. Dengan melihat kondisi dan keberadaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, pemberdayaan hendak dilakukan dalam bentuk :

1. Pendidikan,
2. Pelatihan,
3. Pendampingan,

Lewat ketiga bentuk pemberdayaan ini maka aparatur pemerintahan desa Ilngai akan dapat berinovasi dan berkreasi,

sehingga keahlian dan ketrampilan, sehingga menjadi jaminan mutlak bagi keberhasilan implementasi kebijakan pemerintahan desa di Desa Ilngai. Pemberdayaan akan memberikan kemungkinan bagi keberhasilan badan permusyawaratan desa (BPD) Ilngai serta mampu menciptakan peningkatan kinerja dalam mengimplementasikan pelayanan pemerintahan yang kredibel, berkualitas dan bermartabat bagi masyarakat desa Ilngai.

KESIMPULAN

1. Pemberian Bantuan dari Pemerintah Desa Ilngai Kepada Masyarakat Desa dalam hal peningkatan Sumber Daya Manusia, masih didasarkan pada adanya hubungan keluarga dan kepentingan Politik Kepala Desa,
2. Bahwa Keterlibatan Masyarakat dalam perumusan kebijakan Pemerintah Desa belum sepenuhnya terlaksana, sehingga Pemerintah Desa masih memegang peran penuh dalam merumuskan setiap kebijakan di Desa,
3. Mekanisme perumusan kebijakan Pemerintah Desa belum dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana ketentuan perumusan kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini mempengaruhi persepsi masyarakat yang negatif terhadap Pemerintah Desa dalam meberikan pelayanan

kepada Masyarakat, terutama berhubungan dengan kebijakan Pemerintah Desa terhadap pengembangan sumber daya manusia di Desa Ilngai.

pendidikan berdasarkan analisis kebutuhan di bidang kesehatan dan pendidikan.

SARAN

1. Kepada Pihak yang berwenang agar erlu melakukan fungsi control yang maksimal sehingga meminimalisir penggunaan hak *prerogative* atau hak istimewa serta *Patronage System* dalam proses penentuan kebijakan.
2. Pemerintah Daerah perlu mengkaji ulang setiap tahapan kebijakan secara lebih detail sehingga dapat diketahui konsekwensi yang timbul dari pelaksanaan kebijakan pengalihan jabatan fungsional ke jabatan struktural untuk dijadikan sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan baru dengan sistem tambal sulam.
3. Pemerintah daerah perlu melakukan pemberdayaan dalam tiga bentuk kegiatan yakni pendidikan, pelatihan dan pendampingan bagi aparatur yang belum memenuhi persyaratan untuk ditempatkan dalam jabatan struktural, sehingga dapat menjawab ketersediaan aparatur dalam pengisian jabatan struktural.
4. Perlu dilakukannya rekrutmen apatarur berdasarkan kualifikasi

DAFTAR PUSTAKA

- Alaslan, Amtai. 2021. *Formulasi Kebijakan Publik: Studi Relokasi Pasar*. Banyumas: CV. Pena Persada
- Alaslan, Amtai. 2021. *Kemampuan Pemerintah Desa Dan Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan*. Jurnal OTONOMI Ilmu Administrasi Vol. 9. No. 17
- Bachri. B. S. 2010, *Penelitian Kualitatif*. Jurnal Tknologi Pendidikan. Unesca.
- Barthos Basir. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Satu Pendekatan Makro*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Gunawan Imam. 2014 *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Hasibuan S.P. Melayu. H. 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. PT. Bumi Aksara. Jakarta..
- Miles. M. B, dan Huberman. A. M. 1992, *Buku Sumber Tentang Metode – Metode Baru*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Mulyana Dedy. 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. PT. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung.
- Nawawi Hadari. 2008., *Manajemen Sumber Daya Manusia, Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Universitas Gadjadara. Jogjakarta.
- Sutrisno Edy. 2010., *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana Perdana Media Group. Jakarta
- Suryabrata Sunadi. 2012., *Metodologi Penelitian*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Wather dan Davis 2009., dalam Barthos. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Satu Pendekatan Makro*. PT. Bumi Aksara. Jaka